

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(WPOP SAMSAT SURABAYA SELATAN)**

SKRIPSI



Oleh :

ELVANDA DWI ATMOKO

NIM : 1612311062/FE/AK

Kepada

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

202

SKRIPSI
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (WPOP SAMSAT SURABAYA SELATAN)

Yang diajukan

ELVANDA DWI ATMOKO
1612311062/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi Oleh :

Pembimbing 1



ARIEF RAHMAN, SE., M.Si
NIDN.0722107604

Tanggal: 09-7-2020

Pembimbing 2



Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN.0711115801

Tanggal: 09-7-2020

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra. Ec. MM
NIDN.0703106403

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(WPOP SAMSAT SURABAYA SELATAN)**

Yang diajukan

ELVANDA DWI ATMOKO
1612311062/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya

Pembimbing 1


Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

Pembimbing 2

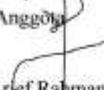

Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Tim Penguji
Ketua


Dr. Ec. L. Tri Lestari M.Si
NIDN. 701747803
Sekretaris


Mahsima, SE., M.Si
NIDN. 0717047803

Anggota


Arief Rahman, SE., M.Si
NIDN. 0722107604

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Siti Rosyafah, Dra.Ec.MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvanda Dwi Atmoko

NIM : 1612311062

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul :

PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (WPOP SAMSAT SURABAYA SELATAN).

adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 05 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



ELVANDA DWI ATMOKO
NIM : 1612311062

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-NYA penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (WPOP SAMSAT SURABAYA SELATAN)”**. Proses penulisan dan penyusunan skripsi ini adalah upaya melengkapi syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Selama Studi dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purna) Drs Edy Prawoto,S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dra. Ec. Siti Rosyafah,. M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si. selaku pembimbing I dan Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak.,CA pembimbing II. yang telah meluangkan waktu, perhatian, kesabaran, dan segala bimbingan serta arahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Segenap Bapak dan Ibu dan Seluruh Staff Universitas Bhayangkara Surabaya telah berjasa memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalankan studi sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan penyusunan skripsi ini selama menempuh studi di kampus.
6. Untuk Kedua Orang tuaku dan seluruh keluargaku, terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa untukku berkat doa dan tidak bosan-bosan memberikan dukungan, semangat dan motivasi, peneliti dapat menjalani halangan dan menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Ucapan terima kasih banyak buat para sahabat di kelas Akuntansi E dan teman teman S-1 angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dukungan dan saling menyemangati satu sama lain.
8. Ucapan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat terbaik Benny, Bingky, Vian, Hendrik, Huda, Krisma, Kiyeb, Suari, Jatmiko telah menemani, menyemangati dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk pengembangan ilmu Akuntansi. Harapan peneliti semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bagi peneliti selanjutnya khususnya.

Surabaya, 12 Juli 2020

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(WPOP SAMSAT SURABAYA SELATAN)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar di SAMSAT Surabaya Selatan.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian *correlation research*. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *accidental sampling*, yaitu pengumpulan data dari responden secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan responden yang ditemui dipandang cocok sebagai sumber data. Pengumpulan data primer dilakukan dengan membagikan kuesioner sebanyak 100 kuisisioner yang berisi pernyataan untuk dijawab oleh responden. Keseluruhan kuesioner dapat diolah lebih lanjut karena telah memenuhi persyaratan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS25.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**INFLUENCE TO KNOWLEDGE AND AWARENESS OF TAX PAYERS
OBEDIENCE IS OBLIGATORY MOTOR VEHICLE TAX (SURABAYA
SAMSAT WPOP SOUTH)**

ABSTRACT

This research aims to test the influence of variable knowledge and awareness of obligatory taxes on motor vehicle tax. obedience is obligatory The population in this research is the whole individual tax payers dmv surabaya enrolled in the south.

This kind of research using a method of quantitative research. correlation with the researchThe sample collection technique using a technique accidental, sampling namely data collection of the respondents a chance encounter with researchers and respondents regarded as good a data source.The collection of the primary data conducted by distributing as much as 100 questionnaire questionnaires containing a statement to be answered by respondents.The whole the questionnaire can be processed further having satisfied. requirementsAnalysis method used is an analysis of multiple linear regression on a walker spss 25. Application

This research result indicates that knowledge taxpayers are not influences obedience is obligatory taxes and awareness taxpayers influences tax obedience is obligatory.

Keywords: knowledge taxpayers, awareness taxpayers, obedience is obligatory tax

DAFTAR ISI

COVER	i
PROPOSAL	ii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Landasan Teori	14
2.2.1 Teori Atribusi	14
2.2.2 Pengertian Pajak.....	16
2.2.3 Pengertian Pajak Daerah	17
2.2.4 Fungsi Pajak.....	18
2.2.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	19
2.2.6 Cara Pemungutan Pajak	20
2.2.7 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	20
2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
2.2.9 Sanksi Perpajakan	23
2.2.10 Pengetahuan Wajib Pajak.....	24
2.2.11 Kesadaran Wajib Pajak	24
2.2.12 Kepatuhan Wajib Pajak.....	25
2.2.13 Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.3 Kerangka Konseptual	27
2.4 Uji Hipotesis.....	28

2.4.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	28
2.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	29
BAB III.	METODE PENELITIAN.....	30
3.1	Kerangka Proses Berpikir.....	30
3.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	31
3.2.1	Pengukuran Variabel.....	32
3.3	Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	33
3.3.1	Teknik Penentuan Populasi.....	33
3.3.2	Besar Sampel.....	33
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel.....	34
3.4	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.4.1	Lokasi.....	35
3.4.2	Waktu penelitian	35
3.5	Prosedur Pengambilan/ Pengumpulan Data	35
3.6	Pengujian Data	36
3.6.1	Analisis Data Deskriptif.....	36
3.7	Hasil Pengujian Hipotesis	38
3.7.1	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.7.2	Regresi Linier Berganda	40
3.8	Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis	41
3.8.1	Teknik Analisis	41
3.8.2	Uji Hipotesis (Uji t).....	42
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	43
4.2	Data dan Deskripsi Hasil Penelitian	44
4.2.1	Karakteristik Responden berdasarkan Usia	45
4.2.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Motor	46
4.3	Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis.....	46
4.3.1	Analisis Data Deskriptif.....	46
4.3.2	Uji Validitas	49

4.3.3	Uji Reabilitas.....	50
4.3.4	Uji Asumsi Klasik.....	51
4.3.5	Regresi Linier Berganda	53
4.3.6	Uji T Parsial (Regresi Linier Berganda) berdasarkan nilai signifikan	55
4.4	Pembahasan	56
4.4.1	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	556
4.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....	57
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN		58
5.1	Simpulan.....	58
5.2	Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN 1		64
LAMPIRAN 2.....		65
LAMPIRAN 3.....		68
LAMPIRAN 4.....		71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin majunya perkembangan zaman membuat seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas ataupun menengah kebawah semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki yaitu transportasi. Alat transportasi memang sangat penting dimiliki karena mampu menunjang kegiatan masyarakat. Alat transportasi seperti kendaraan bermotor tidak menjadi barang yang mewah bagi masyarakat, melainkan menjadi salah satu kebutuhan pokok mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin bertambah (Kemala, 2015). Dalam setiap transaksinya pembeli diwajibkan membayar pajak kendaraan bermotor yang harus dibayarkan setiap tahunnya.

Pajak adalah pungutan negara dari masyarakat yang sifatnya wajib karena sebagian besar penerimaannya digunakan untuk membiayai negara (Siahaan dan Marihot, 2010). Tetapi sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang beranggapan bahwa pemerintah memberatkan masyarakat dalam hal pemungutan pajak, dan masyarakat khawatir penyalahgunaan pajak. Wajib pajak akan cenderung tidak memenuhi kewajiban perpajakannya jika kesadaran wajib pajak rendah. Seorang wajib pajak akan menyadari maksud dan manfaat pemungutan pajak seperti contoh pada membayar pajak bangunan dan bumi tidak digunakan

untuk pihak lain, melainkan jalannya roda pemerintahan dilancarkan agar kepentingan rakyat dapat terurus menurut (Nugroho, 2006).

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009). Semakin tingginya pengetahuan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang di dapat maka Wajib Pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan (Oktafiyanto dan Wardani, 2015; Rusmawanti dan Wardani, 2015; Ummah,2015; Wardani dan Rumiyaun, 2017).

Dalam membayar pajak masyarakat harus mempunyai kesadaran membayar pajak. kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Susilawati, 2013)

Menurut Ilhamsyah dkk (2016) kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto, 2011).

Dikutip dari Radar Solo pada tahun 2019 terdapat penunggakan Wajib Kendaraan Bermotor di Solo yang belum membayar pajaknya pada tahun 2019 sebesar Penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (KBM) bulan Oktober mencapai 117.347 objek nilainya sebesar Rp 21,1 miliar. Jumlah tersebut naik dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tunggakan tahun lalu sebanyak 110.115 objek dan tagihan senilai Rp 15,5 miliar. Tingginya angka penunggakan ini dikarenakan tunggakan 2018 dan tunggakan berjalan. Dengan adanya penunggakan tersebut juga memiliki faktor dari masyarakat diantaranya belum punya uang, mengaku lupa membayar pajak bahkan ada yang kendaraannya dijual namun belum dipajaki. Sampai pertengahan Oktober ini capaian pendataan untuk PKB mencapai 87,8 persen. Sedangkan untuk BBNKB mencapai 84,95 persen, Target pendapatan daerah dari pajak PKB tahun ini sebesar Rp 114,7 miliar. Hingga kini masih kurang Rp 15,9 miliar. Sedangkan target BBNKB senilai Rp 99,5 miliar, masih kurang Rp 16,5 miliar. Meski angka tunggakan miliaran, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pajak daerah.

Selain di Solo, Masyarakat kota Surabaya juga ternyata masih belum mematuhi kewajiban pajak yang ditanggungnya. Hal ini dibuktikan oleh (Widajantie et al.

2019) ,dimana dalam jurnal yang ditulisnya dijelaskan bahwa terjadi kenaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 27,9%. Angka tersebut membuktikan bahwa masyarakat Surabaya selatan belum sepenuhnya sadar akan pentingnya membayar wajib pajak bermotor.

Mengenai tentang sumber penghasilan pajak daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan PKB melalui berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Amri, 2015).

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan *e-samsat* merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan (Yuniar, 2017). Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut. Namun fasilitas *e-Samsat* sudah bisa digunakan di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Untuk wilayah kota Surabaya sendiri pelayanan *e-samsat* sudah bisa dilakukan melalui ATM Bank BRI.

Seperti Penelitian yang dilakukan oleh (Putri and Jati 2012) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

di Denpasar yaitu kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Hasil penelitian dari faktor-faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Pranata dkk (2015) pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif, akan tetapi sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikota bukit tinggi.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya.

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Wardani & Rumiyaun, 2017). Kesadaran perpajakan timbul dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Ketika wajib pajak mulai menyadari pentingnya pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan semakin besar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti termotivasi untuk meneliti kembali secara empiris mengenai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apakah pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut dapat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor berdasarkan data WPOP yang terdaftar di SAMSAT Kota Surabaya. Dengan demikian, judul penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada WPOP SAMSAT Surabaya)**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

1. Untuk menguji secara empiris apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji secara empiris apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini dapat menjangkau berbagai pihak yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Institut Islam Negeri Surakarta.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak dan dapat dijadikan sebagai cerminan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan agar dapat menjadi literature bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan, penulisan skripsi ini dibagi kedalam beberapa bab yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab 2 menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab 3 memaparkan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab 4 menjelaskan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan hasil analisis data, dan pembahasan hasil analisis data (pembuktian hipotesis).

BAB V : PENUTUP

Bab 5 berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. ANIS SYAMSU RIZAL (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah keseluruhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat yang sudah terdaftar di Samsat Drive Thru Jakarta Selatan. Data didapatkan dari pengisian kuisisioner yang dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Polda Metro Jaya Jakarta Selatan.

Persamaan:

1. Meneliti pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Metode pengumpulan data yang digunakan metode survei dengan cara membagikan kuisisioner.
3. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda

Perbedaan:

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari SAMSAT Surabaya Selatan, sedangkan pada penelitian sebelumnya di Kantor Polda Metro Jaya Jakarta Selatan.
2. Variabel independen yang berbeda sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru.

2. Lina Nurlaela (2018)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan kepatuhan wajib pajak serta menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara wawancara dan penyebaran angket berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor. Jenis data yang digunakan adalah

data kuantitatif, dengan sumber data primer. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikan hasil penelitian (nilai eror) sebesar 5%. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan :

1. Meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara wawancara dan penyebaran angket berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Perbedaan :

1. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Kantor SAMSAT Kabupaten Garut.
2. Variabel independen yang berbeda kualitas kualitas pelayanan pajak.

3. Tituk Diah Widajantie, dkk (2019)

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat umum. Pajak adalah salah satu pendapatan negara untuk melakukan aktifitas pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Kepatuhan wajib pajak bermotor merupakan salah satu indikator peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Surabaya selatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan teknik simple random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan :

1. Meneliti pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
2. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian teknik simple random sampling
3. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

4. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berasal dari Kantor SAMSAT Surabaya Selatan.

Perbedaan :

1. Variabel independen yang berbeda sanksi pajak.

Adapun kesimpulan dari peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu ditampilkan pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian dan tahun penelitian	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	ANIS SYAMSU RIZAL (2019)	pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polda Metro jaya Jakarta Selatan.	Menggunakan variabel : X1 Pengetahuan wajib pajak X2 kesadaran wajib pajak X3 sanksi pajak X4 sistem samsat drive throe	Sama-sama meneliti tentang pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
2.	Lina Nurlaela (2018)	kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kabupaten Garut.	Menggunakan Variabel : X2 kualitas pelayanan pajak	Sama-sama meneliti tentang kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3.	Tituk Diah Widajantie, dkk (2019)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Menggunakan variabel : X3 sanksi pajak	Sama-sama meneliti tentang kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
----	---	--	---	---

Sumber : Data 2020

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Menurut Myers (1996), kecenderungan memberi atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan segala sesuatu, termasuk apa yang ada dibalik perilaku orang lain. *Attribution theory* (teori sifat) merupakan posisi tanpa perlu disadari pada saat melakukan sesuatu menyebabkan orang-orang yang sedang menjalani sejumlah tes bisa memastikan apakah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan orang lain dapat merefleksikan sifat-sifat karakteristik yang tersembunyi dalam dirinya, atau hanya berupa reaksi-reaksi yang dipaksakan terhadap situasi tertentu.

Kajian tentang atribusi pada awalnya dilakukan oleh Heider (1958). Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya adalah seseorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan dan memadukan potongan-potongan informasi sampai mereka tiba

pada sebuah penjelasan masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dengan kata lain seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri dalam keadaan sadar, seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti adanya pengaruh social dari orang lain.

Menurut Robbins (2003) penentuan apakah perilaku disebabkan secara internal atau eksternal dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

a. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap biasa maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Sebaliknya, apabila perilaku dianggap suatu hal yang luar biasa maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal.

b. Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila

konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya, apabila konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

c. Konsistensi

Konsistensi yaitu jika seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Penelitian dibidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Mulya (2012). Mulya (2012) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda dan sikap fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah KPP Semarang. Selain itu Istanto (2010) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Hutagaol (2007) menggunakan dasar teori atribusi dikarenakan relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

2.2.2 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam buku Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam buku Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang telah ditetapkan langsung oleh undang-undang untuk menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki.

2.2.3 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walis
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Jenis pajak sebagaimana dimaksud di atas, tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terdapat dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

2.2.4 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011: 1), yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan/sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur).

1. Fungsi Budgetair / Financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut :
 - a) Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
 - b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
 - c) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk produk dalam negeri.

2.2.5 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pudyatmoko (2009:19) menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut :

1. Kewajiban dan hak wajib pajak

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Wajib mendaftarkan diri di KPP yang terletak di wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha serta akan menerima atau mendapatkan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP).
- b. Kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan surat yang akan digunakan oleh Wajib Pajak dalam memberikan laporan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan juga bukan objek pajak serta harta dan kewajibannya. Menurut standar ketentuan peraturan perundang-undangan. SPT memiliki perbedaan, yaitu dibedakan menjadi dua SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa digunakan dalam suatu masa pajak tertentu sebagaimana telah ditentukan keterlambatan waktu penyampaian dua puluh hari setelah akhir masa pajak, sedangkan SPT Tahunan digunakan dalam suatu masa tahun pajak atau bagian tahun pajak, waktu keterlambatan penyampaiannya adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Bagi Wajib Pajak Badan empat bulan setelah akhir tahun.
- c. Kewajiban dalam membayar pajak diterapkan dengan *self assessment system* agar Wajib Pajak dalam menghitung serta menetapkan utang pajak dan fiscus sebagai pengawas sehingga didalam sistem ini Wajib Pajak lebih memiliki sifat aktif dan pemerintah memiliki sifat pasif.
- d. Kewajiban dalam membayar denda Wajib Pajak yang telah melakukan kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja sehingga akan dikenakan sanksi berupa denda.
- e. Kewajiban dalam melakukan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah sebagai informasi yang sangat penting dalam menentukan penetapan utang pajak.
- f. Kewajiban dalam melakukan penyerahan dokumen pada masa pemeriksaan, dalam pemeriksaan ini *self assessment system* diperlukan kepercayaan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan juga diimbangi dengan pengawasan. Dalam menjalankan pengawasan Direktorat Jendral Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan pihak yang diperiksa juga harus bertindak secara kooperatif dalam pemeriksaan.

2. Hak Wajib Pajak

- a. Hak membenarkan SPT, Wajib Pajak mampu membenarkan SPT dalam batasan waktu dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak.
- b. Hak penundaan dan mengangsur dalam pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengangsur dan menunda dalam melaksanakan pembayaran pajak dengan suatu syarat diberikannya jaminan yang dapat berupa garansi, perhiasan, kendaraan

- bermotor (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Demikian juga Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan mempertimbangkan suatu alasan yang sudah diajukan oleh Wajib Pajak.
- c. Hak mendapatkan suatu pengembalian pajak. Jika begitu kredit lebih besar dari jumlah pajak yang terutang jadi Wajib Pajak mempunyai hak dalam meminta kembali kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Hak yang mengajukan suatu gugatan. Wajib Pajak mampu melakukan suatu gugatan jika pemerintah sebagai fiskus membuat suatu kesalahan yang berdampak merugikan bagi Wajib Pajak.
 - e. Hak dalam mengajukan keberatan. Wajib Pajak dapat memberikan ajuan keberatan jika merasa bahwa jumlah pajak, jumlah rugi, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sesuai dengan semestinya.
 - f. Hak dalam mengajukan banding. Pengajuan banding ialah proses kelanjutan dari pengajuan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Jika apabila terjadi permohonan banding ditolak atau diterima sebagian wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang sudah dibayarkan sebelum pengajuan keberatan. Jika apabila pengajuan keberatan diterima sebagian atau semuanya maka kelebihan dalam pembayaran yang dimaksudkan dikembalikan kembali dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% perbulan paling lama 24bulan dengan ketentuan.
 - g. Hak untuk dapat perlindungan terhadap wajib pajak. Dokumen, catatan, pembukuan yang berkaitan dengan wajib pajak akan dirahasiakan serta tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut kepada pihak yang tidak memiliki hak atas permasalahan pajak.
 - h. Hak dalam mendapatkan pengurangan serta pembatalan pajak. Pengurangan dan pembatalan pajak bisa dilakukan karena dalam perhitungan dan penetapan pajak terjadi suatu kesalahan dari pihak fiskus maupun wajib pajak. Permohonan wajib pajak paling banyak dua kali bisa diajukan.

2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel adalah sebagai berikut:

1. Stelsel nyata (*rill stelsel*)
 Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)
 Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan

besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.2.7 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Agar tujuan dari pemungutan pajak dapat tercapai, maka dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus berpegang teguh terhadap asas-asas pemungutan pajak itu sendiri. Sehingga terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asas-asas yang ada. Asas-asas pemungutan pajak yang dituliskan oleh Adam Smith dalam bukunya yang kemudian dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* (Suandy, 2005:27) adalah sebagai berikut :

1. Equality

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda.

2. Certainty

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. Convenience of Payment

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. Economic of Collections

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.

2.2.8 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan menurut

Mardiasmo (2011: 7) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri- cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak itu sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.2.9 Sanksi Perpajakan

Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku. Sehingga sanksi pajak adalah hukuman negative yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang (Jatmiko, 2006). Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang –undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhan atau ditaati. Menurut Ilyas & Burton(2013:65) penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan karena wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diukur dalam undang-undang pajak.

Menurut Mardiasmo (2013) Sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.2.10 Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Wardani & Rumiya (2017:15) Pengertian pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan.

Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sedangkan, pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contoh: lembaga kursus, organisasi masyarakat, dan lain-lain.

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat pada waktunya.

2.2.11 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum & Zulaikha, 2012:8). Menurut Nugroho (2006,58) masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat.

Menurut Indrawan (2014:12) kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara membayar pajak. Menurut (Arum & Zulaika,2012:8) kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010:15) menguraikan bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran (Manik Asri 2009:18) apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.2.12 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di

Indonesia menganut system *Self Assesment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar dan melaporkan kewajibannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan.

Menurut Komalasari (2005:50) tentang kepatuhan (*compliance*), terlebih dahulu diketahui tentang apa yang harus diukur, apakah *evasion*, *avoidance*, *compliance* atau *non compliance*. *Compliance* dapat dikategorikan dalam 2 hal :

1. *Administrative compliance*, merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administrative seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.
2. *Technical compliance*, merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari UU perpajakan.

2.2.13 Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015:25) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara

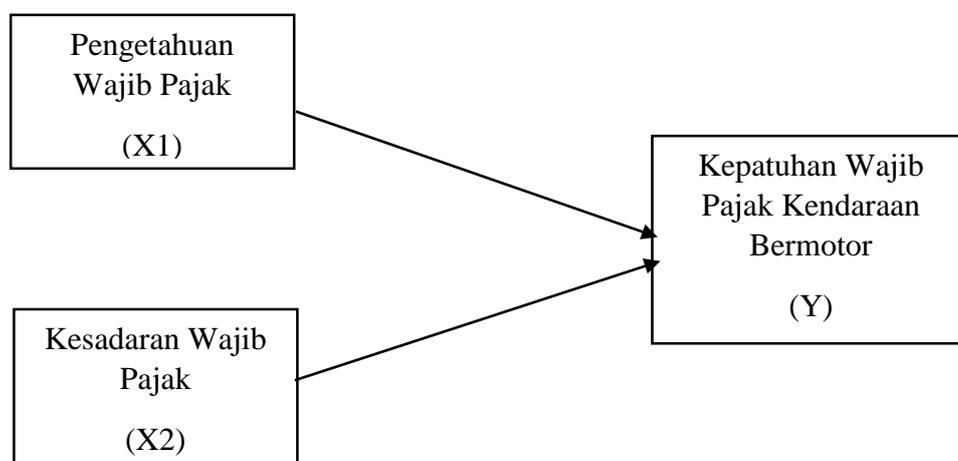
permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Menurut Samudra (2015:26) dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar dapat dihitung dengan cara :

- a. Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
- b. Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya maka akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- c. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka akan dikenakan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
- d. Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar di muka.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesis yang dipaparkan diatas, maka kerangka penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



2.4 Uji Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2010: 141) “digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan”. Semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan kewajiban perpajakan, akan berdampak pada pemenuhan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu dengan dasar keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dan ketidakpatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan berdampak pada penerimaan pajak negara.

Melalui uraian di atas , dalam kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor dapat dikatakan bahwa pengetahuan perpajakan diharapkan dapat membantu Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilhamsyah dkk.,(2016) dan juga penelitian yang lakukan Ihsan pada tahun 2013 memperlihatkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak menurut Irianto (2005:50) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, mengandung arti semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki wajib pajak maka akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk diri sendiri maupun masyarakat, dari sini wajib pajak secara sukarela tanpa paksaan oleh siapapun akan membayar pajak. Wajib Pajak yang sadar akan kewajiban perpajakannya diharapkan akan meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.

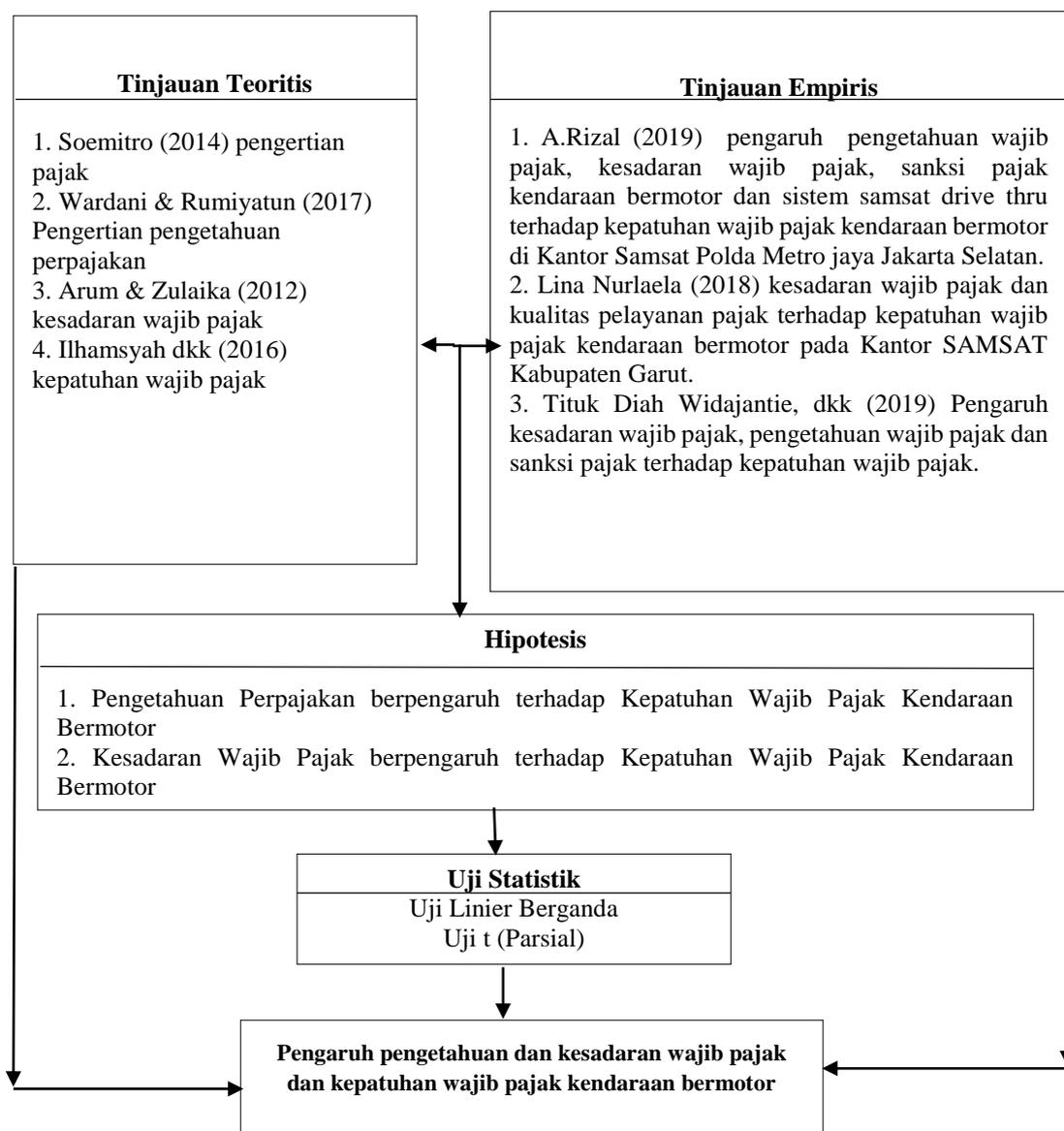
Kesadaran wajib pajak adalah itikad baik yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk melakukan pemenuhan kewajiban membayar pajak secara tulus ikhlas berdasarkan hati nuraninya. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013:235) dan juga dilakukan oleh Ilhamsyah dan kawan-kawan pada tahun 2016 menunjukkan pengaruh yang signifikan ditunjukkan oleh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya, menghasilkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Peneliti (2020)

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi Operasional variabel adalah definisi yang menunjukkan bagaimana variabel diukur atau merupakan prosedur yang dilakukan dalam suatu penelitian. Untuk melihat operasionalisasi suatu variabel harus diukur dengan menggunakan indikator-indikator yang kemudian dapat memperjelas variabel. Berdasarkan teori dalam setiap variabel maka definisi dan indikator setiap variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi	Item
1.	Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya.	Pengetahuan Wajib Pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009).
2.	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran pajak merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Sumber: Wardani, 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. kasadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak 2. kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. 3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

3.	Kepatuhan Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sumber: Wardani, 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Membayar pajak tepat pada waktunya 3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya 4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
----	---------------------	--	---

3.2.1 Pengukuran Variabel

3.2.1.1 Instrumen Penelitian

Menurut penelitian (Ghozali, 2016:78) dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, setiap variabel tersebut diukur dengan skala *Likert*. Menurut Sugiyono (2018:93), skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Penelitian ini menguji 3 variabel yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen diukur dengan menggunakan skala *Likert* yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan jawaban yaitu : sangat tidak setuju, tidak setuju netral setuju dan sangat setuju.

Tabel 3.3
Skala *Likert*

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sebelum data di analisis maka terlebih dahulu melalui uji validitas dan uji reabilitas. Penggunaan tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument.

3.3 Teknik Penentuan Populasi, Besar Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Teknik Penentuan Populasi

Menurut Sugiyono (2018:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan sekumpulan elemen atau unsur (bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, benda, gejala, nilai tes, atau peristiwa) yang menjadi objek penelitian, Dalam penelitian widajantie (2019) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 120.936 wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat dipada tahun 2019 di Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan.

3.3.2 Besar Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2016:81 Menurut Sugiyono (2018:81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Pertimbangan pengambilan sampel dalam penelitian ini wajib pajak orang pribadi di samsat surabaya selatan 100 jumlah sampel. Penulis menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel. Rumus Slovin dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian yang telah diketahui jumlah populasinya.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Populasi

e : Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolelir atau diinginkan.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{120.936}{1 + 120.936 (0,01)^2}$$

$n = 99,9$ (Dibulatkan menjadi 100)

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random sampling* atau sampel acak. *Random sampling* adalah pemilihan suatu sampling dengan sedemikian rupa sehingga setiap sampling dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampling dalam penelitian (Sanuri, 2013).

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi

Lokasi dari obyek penelitian ini adalah SAMSAT Surabaya Selatan Jl. Jatis Seraten, Ketintang, Kec. Gayungan, kota Surabaya.

3.4.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan 21 April 2020 untuk melakukan survei lapangan pengumpulan data yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.5 Prosedur Pengambilan/ Pengumpulan Data

Ada beberapa prosedur yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut :

1. Metode kuesioner

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner merupakan teknik yang paling sederhana dan mudah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode kuesioner ini, diantaranya adalah berupaya sedapat mungkin mempersingkat kuesioner dengan hanya menanyakan hal-hal penting, karena sebagian besar responden akan keberatan jika harus mengisi kuesioner yang panjang (terdiri dari banyak item). Demikian juga dengan penggunaan kata dan kalimat harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi responden (Sujoko, 2004:99). Kuesioner akan dibagikan pada wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) di SAMSAT Surabaya Selatan dengan asumsi mereka mau menjawab semua pertanyaan yang telah disusun oleh penulis.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara melakukan analisis data terhadap semua catatan dan dokumentasi yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai objek penelitian (Sujoko, 2004:99).

3.5 Pengujian Data

3.5.1 Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. (Sugiyono, 2009: 207-208).

2. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018:267), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kalau dalam obyek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah, kalau dalam obyek penelitian para pegawai bekerja dengan keras, maka peneliti melaporkan bahwa pegawai bekerja dengan

keras. Bila peneliti membuat laporan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada obyek, maka data tersebut dapat dinyatakan tidak valid.

Untuk menguji validitas itu, maka penulis memakai teknik korelasi Pearson Product Moment. Menurut Sugiyono (2018:182) rumus koefisien korelasi product moment sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

r : Nilai Koefisien korelasi

$\sum X$: Jumlah pengamatan variabel X

$\sum Y$: Jumlah pengamatan variabel Y

$\sum xy$: Jumlah hasil perkalian variabel x dan Y

$(\sum x^2)$: Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X

$(\sum x)^2$: Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan dari variabel X

$(\sum y^2)$: Jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y

$(\sum y)^2$: Jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y

n : Jumlah pasangan pengamatan Y dan X

Ketentuannya bila r hitung lebih kecil dari tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r tabel ($r_h > r_{\text{tabel}}$) maka H_a diterima.

3. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajekan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala Likert 1-5) adalah Cronbach Alpha. Uji realibilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja dan untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak menggunakan batasan 0,6. Menurut Sekran (2018:25), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Untuk menguji reliabilitas ini, maka penulis menggunakan rumus Spearman-Brown. Menurut Sugiyono (2018:131) rumus reliabilitas sebagai berikut:

$$r_i = \frac{2r_b}{1+r_b}$$

Keterangan :

r_i : Reabilitas internal seluruh instrumen

r_b : Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

3.6 Hasil Pengujian Hipotesis

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi (Ghozali, 2016:77). Model regresi yang baik adalah yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang telah diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Alat uji normalitas yang digunakan untuk menguji data yang berdistribusi normal adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov* (KS). Pada pengujian normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, jika probability value $> 0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal) sedangkan jika probability value $< 0,05$ maka H_0 ditolak (tidak berdistribusi normal).

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2016:77). Dalam penelitian ini yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur validitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1 / Tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi metidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:78).

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik glejser, uji statistik glejser dilakukan dengan mentrasformasi nilai residual menjadi absolut residual dan kemudian meregresnya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikansi untuk variabel independen lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikansi yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah 5% (Ghozali, 2016:137).

3.6.2 Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Analisis regresi berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariante yang umumnya digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indriantoro dan Sumpomo, 2011).

Analisis regresi linier berganda yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu variabel menjadi dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari

analisis dari regresi linier berganda untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negative terhadap variabel dependen.

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.7.1 Teknik Analisis

Tujuan dari metode analisis data yaitu untuk menginterpretasikan dan menarik kesimpulan dari sejumlah data yang sudah terkumpul atau diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis, yaitu : Analisis Kuantitatif. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (*statistical product and service solution*) for windows.

Menurut Sugiyono (2018:147) teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Untuk menguji kebenaran dan hipotesis yang diajukan maka di uji dengan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

- X1 = Pengetahuan Wajib pajak
X2 = Kesadaran Wajib pajak
e = error (Variabel lain tidak dijelaskan)

3.7.2 Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Berdasarkan dasar signifikansi, kriterianya adalah:

1. Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_a ditolak, H_1 diterima.
2. Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima, H_1 ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

Sistem Administrasi Manunggal dibawah satu atap atau yang di sebut SAMSAT, dibentuk pada tahun 1976 dengan surat keputusan bersama tiga Menteri, yaitu Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan menteri Dalam Negeri.

Dalam operasionalnya secara koordinatif dan integratif dilakukan oleh tiga instansi, yaitu : Kepolisian, Dinas Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang mempunyai fungsi kewenangan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Dinas Pendapatan Daerah dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selanjutnya Jasa Raharja (Persero) yang berwenang di bidang penyampaian Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan registrasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak dan SWDKLLJ itulah maka dibentuklah Kantor Bersama Samsat.

Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Kamis tanggal 7 Oktober 2004 meresmikan kantor samsat surabaya selatan dikarenakan karena Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Jawa Timur ingin memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Gubernur Jawa Timur Imam Utomo, Kamis tanggal 7 Oktober 2004 meresmikan Kantor Samsat Surabaya Selatan yang berlokasi di Jl. Jetis Seraten, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235. Dibukanya Samsat yang ketiga di Surabaya ini dikarenakan karena Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Provinsi Jawa Timur ingin memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sebelumnya, Kantor Bersama Samsat di Surabaya hanya ada dua, yakni di Samsat Surabaya Timur (Manyar Kertoharjo) dan Surabaya Utara.

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

Pada tanggal 24 Juni 2020 penulis membuat surat penelitian dari Kampus. Tanggal 24 juni 2020 penulis mengirimkan surat penelitian ke Kantor BANGKESBANPOL Surabaya. Pada tanggal 25 juni 2020 Penulis datang ke Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa timur untuk mengumpulkan berkas yang diperlukan. Setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian di SAMSAT Surabaya Selatan. Pada tanggal 27 juni 2020 penulis datang ke SAMSAT Surabaya Selatan untuk mengumpulkan beberapa berkas sebagai syarat memperoleh izin melakukan penelitian di SAMSAT Surabaya Selatan.

Tanggal 28 penulis datang ke SAMSAT Surabaya Selatan untuk mendapatkan beberapa data yang diperlukan. Penelitian di SAMSAT Surabaya Selatan dilakukan selama 5 hari terhitung mulai tanggal 28 Juni sampai 2 Juli 2020. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 kuesioner.

Tabel 4.1

Proses pembagian kuesioner

Kuesioner yang disebar	Kuesioner yang tidak kembali	Kuesioner yang kembali	Persentase
100	0	100	100%

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 100 dan kembali 100%.

4.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Tabel 4.2

Responden berdasarkan usia

Umur	Frekuensi	Persentase
21-29 Tahun	48	48%
30-45 Tahun	23	23%
46-62 Tahun	29	29%
Total	100	100%

Sumber : Olah Data 2020

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada table 4.2 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berusia 21-39 tahun yaitu sebanyak 48 orang atau 48%. Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia 30-45 tahun yaitu sebanyak 23 orang atau 23%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia 21-29 tahun.

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Motor

Tabel 4.3
Responden Jenis motor

Jenis Motor/Mobil	Fekuensi	Persentase
Motor	87	87%
Mobil	13	13%
Total	100	100%

Sumber : Data Diolah 2020

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis motor/mobil pada tabel 4.3 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden motor yaitu sebanyak 87 atau 87%. Sedangkan jumlah responden mobil adalah sebesar 13 atau 13%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden membayar kendaraan jenis motor.

4.3 Analisis Hasil Penelitian dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Data Deskriptif

Tujuan dari analisis statistika deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Analisis statistika deskriptif ini menggunakan nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), dan standard deviasi atas jawaban responden dari setiap variabel. Hasil analisis statistika deskriptif variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Analisis Deskriptif

N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness
Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
pengetahuan wajib pajak	100	9,00	11,00	20,00	1527,00	15,2700	2,38198	5,674
kesadaran wajib pajak	100	8,00	12,00	20,00	1558,00	15,5800	2,23914	5,014
kepatuhan wajib pajak	100	9,00	11,00	20,00	1514,00	15,1400	1,80359	3,253
Valid N (listwise)	100							

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2020

Uji ini untuk menjelaskan jumlah, rata-rata, min, max setiap data yang ada. Dari hasil analisis data diatas, maka dapat dijelaskan secara rinci masing-masing variabel sebagai berikut:

a. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Hasil penilaian responden terhadap variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan nilai minimum responden sebesar 9,00 dan nilai maksimum responden sebesar 12,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel pengetahuan perpajakan adalah 1527,00 dengan standar deviasi sebesar 15,2700. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, *range* jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 15,2700 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

b. Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Hasil penilaian responden terhadap variabel kesadaran wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 8,00 dan nilai maksimum responden sebesar 4,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel kesadaran wajib pajak adalah 1558,00 dengan standar deviasi sebesar 15,5800. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, range jawaban responden pada variabel kesadaran wajib pajak terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 15,5800 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penilaian responden terhadap variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai minimum responden sebesar 9,00 dan nilai maksimum responden sebesar 20,00. Nilai rata-rata variabel kepatuhan wajib pajak adalah 1514,00 dengan standar deviasi sebesar 15,1400. Nilai rata-rata tersebut dapat berarti bahwa dari skala 1-4, range jawaban responden pada variabel pengetahuan perpajakan terletak antara setuju dan sangat setuju. Sedangkan standar deviasi sebesar 15,1400 menunjukkan bahwa penyimpangan data tersebut kecil karena standar deviasi lebih kecil dari pada nilai rata-rata.

4.3.2 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian indikator yang digunakan untuk pengujian hipotesis. Uji validitas ini menggunakan kriteria dengan menghubungkan masing-masing indikator dengan total indikator setiap variabel. Uji validitas dapat dikatakan valid dengan membandingkan

RHitung dengan RTabel. Ketika nilai RHitung lebih besar daripada nilai RTabel , maka indikator tersebut dinyatakan valid. Uji validitas ini juga dapat valid ketika tingkat signifikan dibawah 0,05.

Tabel 4.5
Uji Validitas

VARIABEL X1	Pearson Correlation	Kesimpulan
Pertanyaan 1	,696**	Valid
Pertanyaan 2	,479**	Valid
Pertanyaan 3	,762**	Valid
Pertanyaan 4	,645**	Valid
Pertanyaan 5	1	Valid

VARIABEL X2	Pearson Correlation	Kesimpulan
Pertanyaan 1	,679**	Valid
Pertanyaan 2	,526**	Valid
Pertanyaan 3	,744**	Valid
Pertanyaan 4	,666**	Valid
Pertanyaan 5	1	Valid

VARIABEL Y	Pearson Correlation	Kesimpulan
Pertanyaan 1	,536**	Valid
Pertanyaan 2	,638**	Valid
Pertanyaan 3	,563**	Valid
Pertanyaan 4	,462**	Valid
Pertanyaan 5	1	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji validitas, dapat disimpulkan bahwa semua indikator pertanyaan yang digunakan adalah valid, karena RHitung dari setiap indikator lebih besar daripada RTabel (0,1966) dan dapat dikatakan valid juga karena tingkat signifikan kurang dari 0,05.

4.3.3 Uji Reabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekonsistenan indikator yang digunakan agar indikator tersebut dapat diandalkan. Uji reabilitas dapat dikatakan reliabel ketika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 4.6
Uji Reabilitas

Model	Cronbach alpha	
X1	0,738	VALID
X2	0,739	VALID
Y	0,659	VALID

Sumber : Olah Data 2020

Dari hasil output diatas menunjukkan nilainya diatas 0,1966 yaitu 0,659 sehingga dinyatakan data Y reliabel.

4.3.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi linear berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasilnya akan dijelaskan satu per satu.

1. Uji Normalitas

jika probability value $> 0,05$ maka H_0 diterima (berdistribusi normal)

Tabel 4.7

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			pengetahuan wajib pajak	kesadaran wajib pajak	kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
N			100	100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		15,2700	15,5800	15,1400
	Std. Deviation		2,38198	2,23914	1,80359
	Most Extreme Differences	Absolute	,114	,150	,119
		Positive	,114	,150	,117
		Negative	-,077	-,087	-,119
Test Statistic			,114	,150	,119
Asymp. Sig. (2-tailed)			,300 ^c	,070 ^c	,100 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Olah Data 2020

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antar variabel-variabel bebas (variabel independent). Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan dari nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance lebih besar daripada 0,10 dan nilai TIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas terhadap data yang di uji.

Tabel 4.8

Model	Tolerance	Vif	
X1	0,097	0,676	Tidak terjadi multikolenieritas
X2	0,097	0,676	Tidak terjadi multikolenieritas

Sumber : Data Diolah 2020

Tabel 4.9

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,923	1,111		7,129	,000		
pengetahuan wajib pajak	-,026	,081	-,035	-,325	,746	,097	0,676
kesadaran wajib pajak	,489	,086	,607	5,697	,000	,097	0,676

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

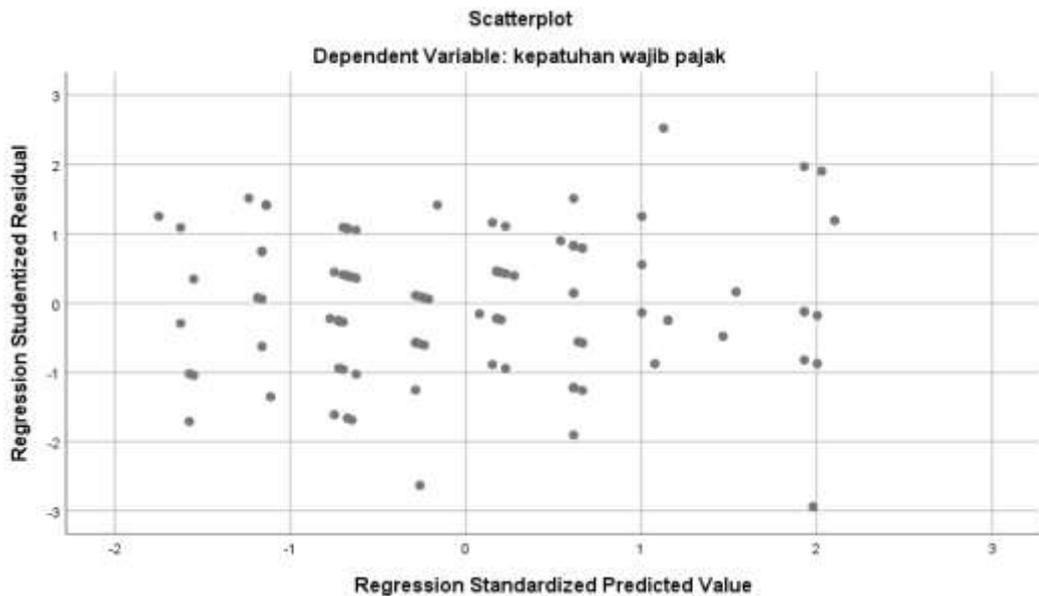
Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.8 dan tabel 4.9 hasil uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Karena nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga model regresi tersebut layak untuk digunakan.

3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Menurut Ghozali (2011) model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Homoskedastisitas adalah ketika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, sedangkan jika terjadi perbedaan disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan bebas heteroskedastisitas dapat dilihat ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.10



a. Dependent Variable: RES2
Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2020

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari heteroskedastisitas. Karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05.

4.3.5 Regresi Linier Berganda

Tujuan dari analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variabel 1 independen berhubungan positif ataupun negatif terhadap variabel dependen. Dari hasil output dibawah ini dapat dilihat persamaan regresi linear berganda seperti berikut :

Tabel 4.11

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,923	1,111		7,129	,000		
pengetahuan wajib pajak	-,026	,081	-,035	-,325	,746	,097	0,676
kesadaran wajib pajak	,489	,086	,607	5,697	,000	,097	0,676

Sumber : Data Diolah 2020

$$Y = 7,923 + -0,026 X1 + 0,489 X2 + e$$

Y = kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Pengetahuan Wajib pajak

X2 = Kesadaran Wajib pajak

e = error (Variabel lain tidak dijelaskan)

1. Konstanta

Nilai konstanta sebesar 7,923 menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, artinya jika Pengetahuan wajib pajak (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) tidak ada atau bernilai 0 maka kepatuhan wajib pajak (Y) bernilai 7,923.

2. Koefisien pengetahuan wajib pajak (X1)

Nilai koefisien pengetahuan wajib pajak (X1) sebesar $-0,026$ artinya pengetahuan wajib pajak mempunyai hubungan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka setiap satu-satuan nilai pengetahuan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar $-0,026$ satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Koefisien kesadaran wajib pajak (X2)

Nilai koefisien kesadaran wajib pajak (X2) sebesar $0,489$ artinya kesadaran wajib pajak mempunyai hubungan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka setiap satu-satuan nilai kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar $0,489$ satuan dengan asumsi variabel lain konstan.

4.3.6 Uji T Parsial (Regresi Linier Berganda) berdasarkan nilai signifikan

Tabel 4.12
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,923	1,111		7,129	,000		
pengetahuan wajib pajak	-,026	,081	-,035	-,325	,746	,097	0,676
kesadaran wajib pajak	,489	,086	,607	5,697	,000	,097	0,676

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
Sumber : Data Diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji t, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengetahuan Wajib Pajak (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

(y) karena nilai signifikansi $> 0,05$ yaitu 0,746 sedangkan kesadaran wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (y) karena nilai signifikansi $< 0,05$ yaitu 0,000.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena pengetahuan perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar -0,026 dan nilai signifikansi sebesar 0,764.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Rumiya (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dengan wajib pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan maka akan membuat wajib pajak tidak ragu untuk membayarkan pajaknya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Widajantie, dkk (2019) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak kendaraan bermotor belum

memahami peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien sebesar 0,489 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Arum & Zulaikha, 2012). Menurut Nugroho (2006) masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui dan menghargai dan menaati perpajakan yang berlaku untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian tentang pajak. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila kesadaran wajib pajak meningkat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Anis Syamsu Rizal (2019) dan Lina Nurlaela (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena bila wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak maka akan membuat wajib pajak tersebut patuh.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Surabaya Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.13 atau hasil dari uji T yang dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,746 maka H_0 (berdistribusi normal) ditolak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.13 atau hasil dari uji T yang dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 maka H_0 (tidak berdistribusi normal) diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan analisa yang telah dilakukan oleh peneliti, penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga banyak yang perlu diperbaiki dan diperhatikan lagi untuk peneliti sebelumnya.

1. SAMSAT Surabaya Selatan perlu meningkatkan sosialisasi tentang pengetahuan wajib pajak serta peraturan perpajakan yang berlaku. Mengingat masih banyak wajib pajak yang belum memahami peraturan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang sudah dibuat oleh Pemerintah daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini, serta dapat menambah jumlah sampel dalam penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Pahmi. 2015. "Implementasi Pelayanan SAMSAT *Corner* dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2014". *Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Vol.2 No.2.
- Arum, Z. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di wilayah KPP Pratama Cilacap). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 1 : h:1-8
- Carolina, Veronica. 2009. *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Vol. Cetakan ke VIII: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.78-79.
- Heider, F.1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. New Jersey Hillsdale : Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak, from <http://ejournal.uajy.ac.id/974/3/2EA16812.pdf>
- Lina Nur Laela (2018) : Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kabupaten garut, from <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JA/article/view/342PENGARUH>
- <https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/11/18/166347/tunggakan-pajak-kendaraan-bermotor-rp-21-miliar>
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ihsan, Muchsin. (2013). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak. Penyuluhan Pajak. Pelayanan Pajak. Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang". *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Ilhamsyah, dkk. (2016). "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)". *Jurnal perpajakan (JEJAK)*. Vol. 8 No. 1 2016.
- Irianto. 2010. *Analisi Pengaruh Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak*. <http://respository.usu.ac.id>. Diakses pada 03 April 2013

- Istanto, Feri. 2010. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak". Skripsi UIN, Jakarta.
- Jatmiko, Nugroho Agus. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak : Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang. Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Jayanto, Prabowo Yudo. (2011). Faktor-faktor ketidakpatuhan wajib pajak. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 2(1) : h : 48-61.
- Kemala, 2015. Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sikap wajib Pajak dan reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Manik Asri, Wuri. (2009). Pengaruh kualitas pelayanan, biaya kepatuhan pajak dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*. hal 18-19.
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan, Yogyakarta : Andi. Edisi Revisi.
- Mulya, Imam. 2012, "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cianjur". Skripsi Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
- Myers, D.G., 1996, Social Psychology, McGraw Hill, New York.
- Nugroho, agus. 2006. strategi jitu. Memilih metode statistik penelitian dengan metode SPSS, 58.
- Oktaviyanto, Imam dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Pranata Dkk. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi. *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta*.
- Pudyatmoko, Y. S. 2009. *Pengantar Hukum Pajak*. Andi. Yogyakarta.

- Putri, Amanda R. Ketut Jati. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- RIZAL, A. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem drivethru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58., from <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Alih Bahasa Tim Index. Jakarta: Indeks
- Samudra, Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 25-26.
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (pada Kecamatan Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 1–25.
- Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sujoko, Efferin, dkk. (2004). *Metode Penelitian untuk Akuntansi*. Edisi pertama. Media Komputindo, Kelompok Publishing.
- Supomo, N. I. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2 (2013):345-357
- Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15.
- Widajantie, Tituk Diah, Dyah Ratnawati, Tamadoy Thamrin, and Muhammad Hilmi Arifin. 2019. "Pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, wajib pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor (kantor bersama samsat

surabaya selatan).” *Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 2* (1): 41–53.

Widayanti dan Nurlis.2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak WPOP yang Melakukan Pekerjaan Bebas.(Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Simposium Nasional Akuntansi 13*

Yuniar, A. (2017). Lebih Mudah Bayar Pajak Online, Begini Cara Lengkapnya. Retrieved January 4, 2018, from <http://otomotif.liputan6.com/read/3189409/lebih-mudah-bayar-pajak-online-begini-cara-lengkapny>

LAMPIRAN 1

1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya					
2.	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya					
3.	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					
4.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
5.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor					

2. PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan					
3.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan					
	Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas					
5.	Saya memahami batas waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor					

3. KESADARAN WAJIB PAJAK

No.	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan daerah					
2.	Pajak Kendaraan Bermotor yang saya bayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Daerah					
3.	Ketika saya menunda untuk membayarkan pajak maka saya akan merugikan Negara					
4.	Saya membayar dan melaporkan Pajak Kendaraan Bermotor dengan sukarela/tanpa paksaan					
5.	Saya memenuhi kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor dengan benar					

LAMPIRAN 2

Pengetahuan Wajib Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

No	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X1)				
Responde n	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	JUMLAH
1	4	2	4	5	15
2	4	4	5	1	14
3	4	4	4	3	15
4	4	2	3	4	13
5	4	2	3	4	13
6	4	4	5	4	17
7	5	1	2	5	13
8	4	2	3	4	13
9	4	2	3	4	13
10	4	2	3	2	11
11	5	5	5	5	20
12	4	2	2	4	12
13	4	2	3	3	12
14	5	1	5	4	15
15	4	1	2	4	11
16	5	3	2	4	14
17	4	3	3	4	14
18	5	3	5	3	16
19	5	1	5	5	16
20	4	4	4	3	15
21	5	4	3	4	16
22	5	2	4	5	16
23	4	2	4	4	14
24	4	4	4	3	15
25	5	2	5	5	17
26	4	3	4	3	14
27	5	1	5	5	16
28	4	3	5	5	17
29	4	4	2	5	15
30	4	2	5	4	15
31	5	3	4	2	14
32	4	2	4	2	12
33	3	2	3	3	11
34	4	3	4	4	15

35	4	3	4	3	14
36	4	4	4	3	15
37	4	3	4	3	14
38	5	4	5	5	19
39	5	2	5	5	17
40	5	1	5	5	16
41	4	3	4	4	15
42	5	2	5	5	17
43	5	2	5	3	15
44	5	3	5	4	17
45	5	3	5	5	18
46	5	2	5	5	17
47	1	4	1	5	11
48	4	2	4	3	13
49	4	2	4	4	14
50	5	5	5	5	20
51	4	3	3	3	13
52	3	3	3	3	12
53	5	2	5	5	17
54	4	3	4	3	14
55	4	2	4	4	14
56	4	2	4	4	14
57	5	2	4	4	15
58	4	4	4	4	16
59	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16
61	5	1	5	5	16
62	5	4	4	3	16
63	4	4	4	4	16
64	4	4	4	5	17
65	5	2	5	5	17
66	5	2	4	4	15
67	5	2	5	4	16
68	4	2	5	5	16
69	5	2	5	3	15
70	3	4	3	2	12
71	3	3	4	4	14
72	4	2	4	4	14
73	4	2	5	4	15
74	4	2	4	3	13
75	4	2	4	3	13

76	4	4	4	2	14
77	4	3	4	4	15
78	4	3	2	3	12
79	4	3	4	3	14
80	3	4	4	3	14
81	3	2	3	3	11
82	5	2	5	5	17
83	5	5	5	5	20
84	5	2	5	5	17
85	5	2	5	5	17
86	5	5	5	5	20
87	4	2	3	4	13
88	4	3	4	3	14
89	5	5	5	5	20
90	3	2	2	4	11
91	5	5	5	5	20
92	5	5	5	5	20
93	5	5	5	5	20
94	5	5	5	5	20
95	5	2	5	5	17
96	5	2	5	5	17
97	5	2	5	5	17
98	5	2	5	5	17
99	5	2	5	5	17
100	5	5	5	5	20

LAMPIRAN 3

Kesadaran Wajib Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020

KESADARAN WAJIB PAJAK (X2)					
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	JUMLAH	
5	2	5	5	17	
5	4	5	4	18	
2	4	4	4	14	
4	2	4	4	14	
4	2	4	4	14	
2	4	3	4	13	
5	5	5	5	20	
4	2	4	4	14	
4	2	4	4	14	
4	2	4	4	14	
5	5	5	4	19	
4	3	3	3	13	
4	2	4	4	14	
5	1	5	5	16	
5	1	4	5	15	
5	3	5	5	18	
4	2	3	3	12	
4	3	5	5	17	
5	5	1	5	16	
4	2	5	5	16	
4	2	5	5	16	
3	3	4	4	14	
4	2	2	4	12	
5	2	4	4	15	
5	1	5	5	16	
4	2	3	4	13	
5	1	5	5	16	
4	3	3	4	14	
5	2	5	3	15	
5	1	4	5	15	
5	1	4	5	15	
4	4	4	4	16	

4	2	3	3	12
4	2	4	4	14
4	2	3	4	13
4	2	2	5	13
5	1	5	5	16
5	1	1	5	12
5	3	5	5	18
5	5	5	5	20
5	2	5	5	17
5	2	5	5	17
5	2	5	5	17
4	3	5	5	17
5	5	5	5	20
5	5	5	4	19
3	5	3	3	14
4	2	3	4	13
4	2	4	5	15
5	2	5	5	17
4	2	4	4	14
3	3	3	3	12
5	2	5	5	17
5	4	4	3	16
4	2	5	5	16
4	2	3	4	13
5	2	5	5	17
4	3	4	4	15
4	3	4	4	15
4	3	4	4	15
5	1	5	5	16
4	2	5	4	15
4	2	4	4	14
5	2	5	5	17
5	2	5	5	17
5	4	4	5	18
4	2	5	5	16
4	2	4	5	15
5	2	5	5	17
3	3	3	3	12
4	2	4	4	14
4	2	4	4	14
4	2	4	4	14

LAMPIRAN 4

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) Tahun 2020

KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)					
Y1.1	Y2.2	Y3.3	Y4.4	JUMLAH	
5	5	5	2	17	
4	5	5	2	16	
4	3	4	2	13	
4	4	4	4	16	
4	4	4	3	15	
4	4	4	4	16	
4	5	5	5	19	
4	4	4	4	16	
4	5	5	1	15	
5	5	5	1	16	
5	4	5	2	16	
4	3	3	2	12	
4	2	4	2	12	
5	4	4	2	15	
4	4	5	4	17	
4	5	5	2	16	
5	5	3	2	15	
4	5	5	1	15	
5	5	4	1	15	
5	4	5	2	16	
5	5	5	1	16	
4	5	5	1	15	
4	4	4	1	13	
4	4	5	1	14	
5	5	5	2	17	
4	5	3	3	15	
5	5	4	1	15	
5	3	4	2	14	
2	4	4	1	11	
5	5	4	1	15	
5	4	5	1	15	
5	4	5	2	16	
3	4	4	1	12	
4	4	4	2	14	
4	3	4	3	14	
4	4	4	2	14	

5	5	5	1	16
4	4	5	2	15
5	4	4	2	15
5	5	5	5	20
5	5	4	1	15
5	5	5	1	16
5	3	5	1	14
5	5	5	3	18
5	2	5	1	13
5	4	4	4	17
5	3	5	2	15
4	2	5	5	16
4	3	5	2	14
5	5	5	2	17
4	2	4	2	12
3	3	3	2	11
5	2	5	1	13
4	3	5	2	14
5	5	5	2	17
4	4	4	3	15
5	5	5	2	17
4	3	4	3	14
4	3	4	3	14
4	3	4	3	14
5	5	5	1	16
4	3	5	3	15
4	2	4	2	12
5	2	4	3	14
5	2	5	2	14
5	5	5	5	20
5	4	5	2	16
5	2	5	1	13
5	3	4	3	15
4	3	3	2	12
4	4	4	2	14
5	5	4	2	16
4	4	4	2	14
4	4	5	3	16
4	4	5	3	16
4	4	4	3	15
4	4	4	2	14

5	5	4	1	15
4	4	4	3	15
4	3	3	3	13
4	4	4	2	14
5	4	4	1	14
4	4	4	4	16
5	5	5	2	17
5	5	5	1	16
5	5	5	2	17
4	5	4	2	15
3	3	4	3	13
5	5	5	2	17
4	3	4	2	13
5	5	5	5	20
5	5	5	1	16
5	3	5	5	18
5	5	5	2	17
5	5	5	2	17
5	4	5	2	16
5	5	5	2	17
5	5	5	2	17
5	2	5	2	14
5	3	5	2	15

LAMPIRAN 4

		VAR0000 1	VAR0000 2	VAR0000 3	VAR0000 4	X1	diatas 0,196 6
VAR0000 1	Pearson Correlatio n	1	-0,058	,634**	,432**	,696*	valid
	Sig. (2- tailed)		0,568	0,000	0,000	0,00 0	
	N	100	100	100	100	100	
VAR0000 2	Pearson Correlatio n	-0,058	1	0,084	-0,035	,479*	valid
	Sig. (2- tailed)	0,568		0,406	0,727	0,00 0	
	N	100	100	100	100	100	
VAR0000 3	Pearson Correlatio n	,634**	0,084	1	,327**	,762*	valid
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,406		0,001	0,00 0	
	N	100	100	100	100	100	
VAR0000 4	Pearson Correlatio n	,432**	-0,035	,327**	1	,645*	valid
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,727	0,001		0,00 0	
	N	100	100	100	100	100	
X1	Pearson Correlatio n	,696**	,479**	,762**	,645**	1	valid
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		
	N	100	100	100	100	100	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	X2	
VAR00001	Pearson Correlation	1	-0,012	,462**	,578**	,679**	valid
	Sig. (2-tailed)		0,909	0,000	0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	
VAR00002	Pearson Correlation	-0,012	1	0,062	-0,061	,526**	valid
	Sig. (2-tailed)	0,909		0,541	0,548	0,000	
	N	100	100	100	100	100	
VAR00003	Pearson Correlation	,462**	0,062	1	,509**	,744**	valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,541		0,000	0,000	
	N	100	100	100	100	100	
VAR00004	Pearson Correlation	,578**	-0,061	,509**	1	,666**	valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,548	0,000		0,000	
	N	100	100	100	100	100	
X2	Pearson Correlation	,679**	,526**	,744**	,666**	1	valid
	Sig. (2-tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		
	N	100	100	100	100	100	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		VAR0000 1	VAR0000 2	VAR0000 3	VAR0000 4	Y	
VAR0000 1	Pearson Correlation	1	,248 [*]	,431 ^{**}	-0,143	,536 ^{**}	valid
	Sig. (2- tailed)		0,013	0,000	0,155	0,000	
	N	100	100	100	100	100	
VAR0000 2	Pearson Correlation	,248 [*]	1	,215 [*]	-0,118	,638 ^{**}	Valid
	Sig. (2- tailed)	0,013		0,032	0,241	0,000	
	N	100	100	100	100	100	
VAR0000 3	Pearson Correlation	,431 ^{**}	,215 [*]	1	-0,067	,563 ^{**}	valid
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,032		0,511	0,000	
	N	100	100	100	100	100	
VAR0000 4	Pearson Correlation	-0,143	-0,118	-0,067	1	,462 ^{**}	valid
	Sig. (2- tailed)	0,155	0,241	0,511		0,000	
	N	100	100	100	100	100	
Y	Pearson Correlation	,536 ^{**}	,638 ^{**}	,563 ^{**}	,462 ^{**}	1	valid
	Sig. (2- tailed)	0,000	0,000	0,000	0,000		
	N	100	100	100	100	100	

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

MENGUJI DATA X 1

```

DATASET ACTIVATE DataSet0.
RELIABILITY
  /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 X1
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA
  /SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

		Notes
Output Created		05-JUL-2020 18:27:52
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 X1 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,02

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,738	5

(tabel ini yang di masukkan di bab 4, nilainya diatas 0,1966 yaitu 0,738 sehingga dinyatakan data X1 reliabel)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	26,2000	18,545	,608	,700
VAR00002	27,7300	18,805	,265	,765
VAR00003	26,4300	16,631	,654	,662
VAR00004	26,5300	17,726	,502	,703
X1	15,2700	5,674	1,000	,482

MENGUJI DATA X 2

```
DATASET ACTIVATE DataSet1.
RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 X2
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.
```

Reliability

			Notes
Output Created			05-JUL-2020 18:35:30
Comments			
Input	Active Dataset		DataSet1
	Filter		<none>
	Weight		<none>
	Split File		<none>
	N of Rows in Working Data File		100
	Matrix Input		
	Missing Value Handling	Definition of Missing Cases Used	User-defined missing values are treated as missing. Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax			RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 X2 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time		00:00:00,00
	Elapsed Time		00:00:00,01

[DataSet1]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,739	5

(tabel ini yang di masukkan di bab 4, nilainya diatas 0,1966 yaitu 0,739 sehingga dinyatakan data X2 reliabel)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	26,8000	16,202	,577	,701
VAR00002	28,5500	15,907	,297	,761
VAR00003	26,9400	14,784	,629	,669
VAR00004	26,7700	16,462	,567	,706
X2	15,5800	5,014	1,000	,485

MENGUJI DATA Y

DATASET ACTIVATE DataSet2.

```

RELIABILITY
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 Y
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

```

Reliability

			Notes
Output Created			05-JUL-2020 18:37:21
Comments			
Input	Active Dataset		DataSet2
	Filter		<none>
	Weight		<none>
	Split File		<none>
	N of Rows in Working Data File		100
	Matrix Input		
Missing Handling	Value Definition of Missing		User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used		Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax			RELIABILITY /VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 Y /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL.
Resources	Processor Time		00:00:00,02
	Elapsed Time		00:00:00,01

[DataSet2]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	100	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,659	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	25,8100	11,024	,398	,634
VAR00002	26,3000	9,424	,425	,603
VAR00003	25,8100	10,903	,431	,627
VAR00004	28,0600	10,582	,180	,705
Y	15,1400	3,253	1,000	,145

NEW FILE.

DATASET NAME DataSet3 WINDOW=FRONT.

DATASET CLOSE DataSet0.

DATASET CLOSE DataSet1.

DATASET CLOSE DataSet2.

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y

/STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX KURTOSIS
SKEWNESS.

Descriptives

		Notes	
Output Created			05-JUL-2020 18:48:10
Comments			
Input	Active Dataset	DataSet3	
	Filter	<none>	
	Weight	<none>	
	Split File	<none>	
	N of Rows in Working Data File		100
Missing Value	Definition of Missing	User defined missing values are treated as missing.	
Handling	Cases Used	All non-missing data are used.	
Syntax		DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y /STATISTICS=MEAN SUM STDDEV VARIANCE RANGE MIN MAX KURTOSIS SKEWNESS.	
Resources	Processor Time		00:00:00,00
	Elapsed Time		00:00:00,04

UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Rang	Minimu	Maxim	Sum	Mean	Std.	Varian	Skewness		Kurtosis	
		e	m	um			Deviasi		tic	Std	tic	Std
	Statis	Statis	Statisti	Statisti	Statist	Statist	Statisti	Statisti	Statis	Err	Statis	Err
	tic	tic	c	c	ic	ic	c	c	tic	or	tic	or
pengetahuan wajib pajak	100	9,00	11,00	20,00	1527,00	15,2700	2,38198	5,674	,304	,241	-,288	,478
kesadaran wajib pajak	100	8,00	12,00	20,00	1558,00	15,5800	2,23914	5,014	,377	,241	-,622	,478
kepatuhan wajib pajak	100	9,00	11,00	20,00	1514,00	15,1400	1,80359	3,253	,208	,241	,538	,478
Valid N (listwise)	100											

REGRESSION

```

/DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X1 X2
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3) .

```

Regression

Notes

Output Created		05-JUL-2020 19:13:06
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet3
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	100
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		<pre> REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 /SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /CASEWISE PLOT(ZRESID) OUTLIERS(3). </pre>
Resources	Processor Time	00:00:03,44
	Elapsed Time	00:00:02,50
	Memory Required	2912 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	664 bytes

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan wajib pajak	15,1400	1,80359	100
pengetahuan wajib pajak	15,2700	2,38198	100
kesadaran wajib pajak	15,5800	2,23914	100

Correlations

			kepatuhan wajib pajak	pengetahuan wajib pajak	kesadaran wajib pajak
Pearson Correlation	kepatuhan wajib pajak		1,000	,351	,585
	pengetahuan wajib pajak		,351	1,000	,635
	kesadaran wajib pajak		,585	,635	1,000
Sig. (1-tailed)	kepatuhan wajib pajak		.	,000	,000
	pengetahuan wajib pajak		,000	.	,000
	kesadaran wajib pajak		,000	,000	.
N	kepatuhan wajib pajak		100	100	100
	pengetahuan wajib pajak		100	100	100
	kesadaran wajib pajak		100	100	100

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,586 ^a	,343	,329	1,47700	1,957

a. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	110,432	2	55,216	25,311	,000 ^b
	Residual	211,608	97	2,182		
	Total	322,040	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	Variance Proportions	
					pengetahuan wajib pajak	kesadaran wajib pajak
1	1	2,980	1,000	,00	,00	,00
	2	,012	15,640	,91	,37	,05
	3	,008	19,613	,08	,63	,95

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

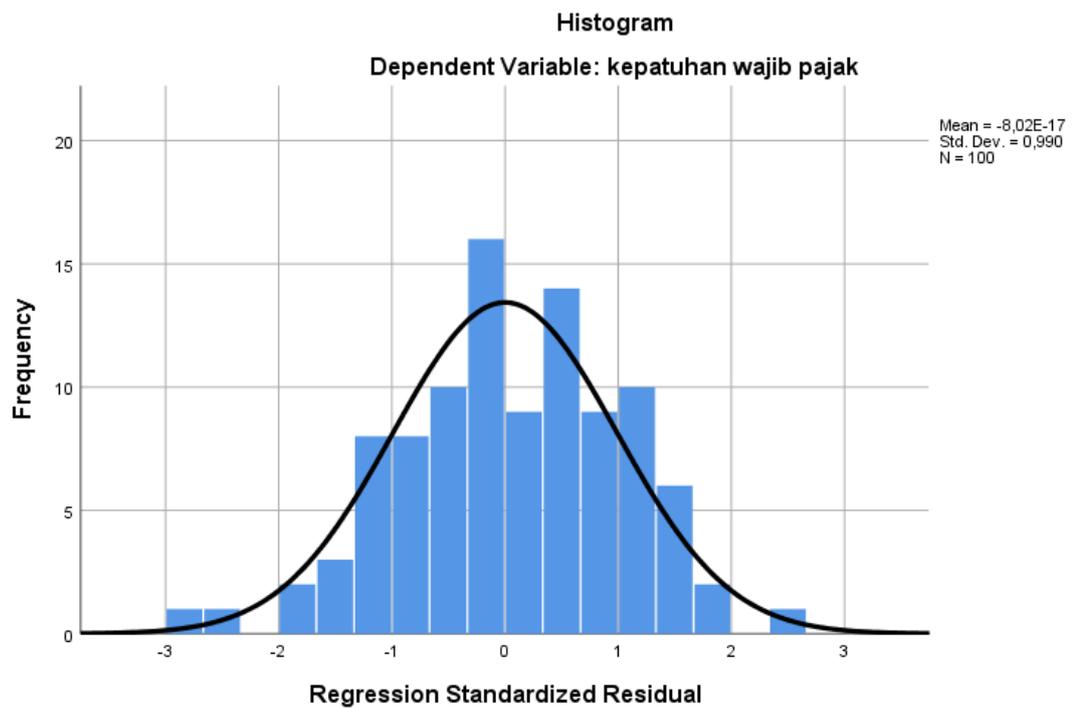
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13,2919	17,3605	15,1400	1,05616	100
Std. Predicted Value	-1,750	2,102	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,153	,569	,243	,081	100
Adjusted Predicted Value	12,9937	17,4499	15,1322	1,05748	100
Residual	-4,22938	3,66976	,00000	1,46200	100
Std. Residual	-2,863	2,485	,000	,990	100

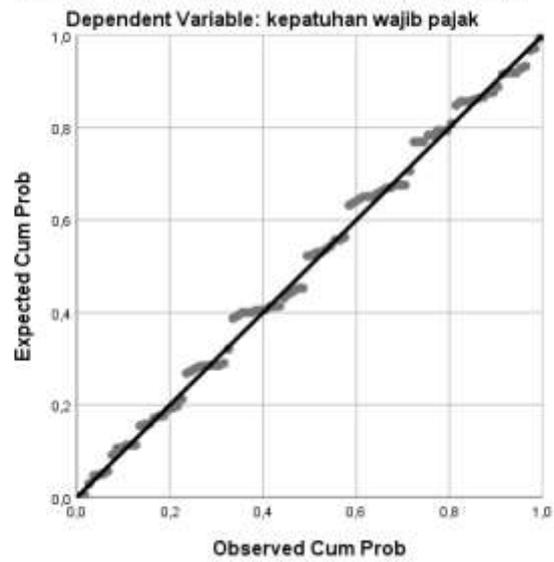
Stud. Residual	-2,937	2,526	,003	1,007	100
Deleted Residual	-4,44989	3,79353	,00781	1,51428	100
Stud. Deleted Residual	-3,061	2,600	,001	1,019	100
Mahal. Distance	,071	13,724	1,980	2,229	100
Cook's Distance	,000	,150	,012	,023	100
Centered Leverage Value	,001	,139	,020	,023	100

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

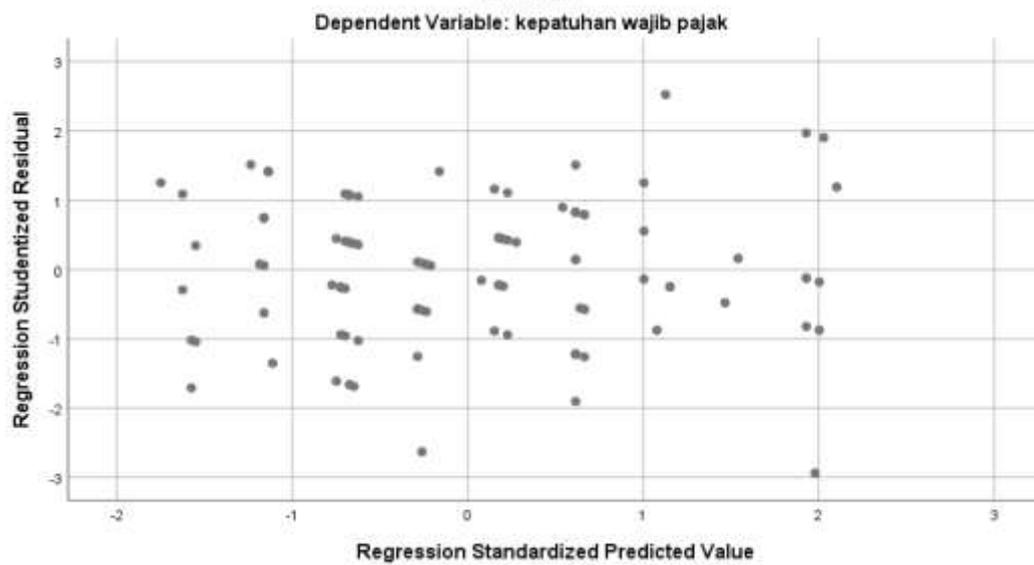
Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



UJI T**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,923	1,111		7,129	,000		
pengetahuan wajib pajak	-,026	,081	-,035	-,325	,746	,097	0,676
kesadaran wajib pajak	,489	,086	,607	5,697	,000	,097	0,676

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Sumber : Olah Data 2020

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions (Constant)	Variance Proportions	
					pengetahuan wajib pajak	kesadaran wajib pajak
1	1	2,980	1,000	,00	,00	,00
	2	,012	15,640	,91	,37	,05
	3	,008	19,613	,08	,63	,95

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13,2919	17,3605	15,1400	1,05616	100
Std. Predicted Value	-1,750	2,102	,000	1,000	100
Standard Error of Predicted Value	,153	,569	,243	,081	100
Adjusted Predicted Value	12,9937	17,4499	15,1322	1,05748	100
Residual	-4,22938	3,66976	,00000	1,46200	100
Std. Residual	-2,863	2,485	,000	,990	100
Stud. Residual	-2,937	2,526	,003	1,007	100
Deleted Residual	-4,44989	3,79353	,00781	1,51428	100
Stud. Deleted Residual	-3,061	2,600	,001	1,019	100
Mahal. Distance	,071	13,724	1,980	2,229	100
Cook's Distance	,000	,150	,012	,023	100
Centered Leverage Value	,001	,139	,020	,023	100

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak

